

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192 TAHUN 2021

TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan demi menjamin keselamatan Aparatur Sipil Negara dan penyedia jasa lainnya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama menjalankan tugas kedinasannya;
- b. dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan

Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyedia jasa lainnya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempergunakan berbagai media yang tersedia;
- b. Berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 serta penyiapan layanan kesehatan yang memadai untuk melakukan deteksi dan perawatan bagi pasien yang terindikasi terpapar COVID-19 baik yang berasal dari ASN/penyedia jasa lainnya/tamu/pengunjung;
- c. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk penanggulangan COVID-19 termasuk penyediaan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas lain yang diperlukan;

- d. Mengawasi dan melakukan tindakan perbaikan dalam hal penerapan kekarantinaan kesehatan, pembatasan interaksi dan kontak fisik, serta prinsip kewaspadaan umum pencegahan penyakit menular; dan
- e. Melakukan edukasi tentang tatanan normal baru dan budaya hidup bersih kepada ASN dan penyedia jasa lainnya melalui berbagai media yang tersedia dalam rangka upaya pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 142 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

ttd

SARAH SADIQA


Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 192 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 OKTOBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	: Plt. Kepala
2.	Ketua	: Sekretaris Utama
3.	Wakil Ketua	: 1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
4.	Sekretaris	: Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5.	Sub Tim Sosialisasi dan Publikasi	
	Anggota	: 1. Mukti Herlambang 2. Makkiyah Farizqi 3. Anita Rachmawati 4. Teguh Setiarso 5. Yasinta Purnamasari
6.	Sub Tim Pengelola Kerja Sama	
	Anggota	: 1. Setio Widodo 2. Ranto 3. Miftah Irfaniah 4. Indra Lesmana

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama
		5. Ribut Aji Kasmiadi 6. Firdo Budi Prasetyo 7. Muhammad Aditia Putra
7.	Sub Tim Pengendalian Kasus Konfirmasi dan Kontak Erat	
	Anggota	: 1. Wildan Massani (Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum) 2. Deddy Andrianto (Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum) 3. Reza Fauzan (Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum) 4. Festiana Niyanti (Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia) 5. Muhammad Sukron Arif (Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia) 6. Cecep Hendar Supriadi (Biro Perencanaan dan Keuangan) 7. Octo Army (Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum) 8. Mario Duwi Cahyo (Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus) 9. Anita Carollin (Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional) 10. Andy Martanto (Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan) 11. Febrita Sidabalok (Direktorat Pengembangan Sistem Katalog) 12. Mahsa Elvina Rahmawyanet (Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik) 13. Anastasia Citra Puspita (Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan) 14. Adreng Kusuma Ayuningtyas (Direktorat Sertifikasi Profesi)

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama
		15. Nuraini Darmastuti (Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat) 16. Yustitia Fernando (Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah) 17. Carolina Maria Anggreini (Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum) 18. Rinaldy Prihandoko (Inspektorat) 19. Tri Susanto (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa) 20. Andi Supriyadi (<i>Building Management</i>) 21. Guruh Bagus Norman (<i>Building Management</i>) 22. Muhammad Tonny (<i>Building Management</i>)
8.	Sub Tim Pengelola Pengelola Data dan Informasi	
	Anggota	: 1. Yudi Prasetiawan 2. Imelda Liliana 3. Jidda Hadiyana
9.	Sub Tim Sarana dan Prasarana	
	Anggota	: 1. Muhammad Adiwibowo Soedarmo 2. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 3. Sulmiari 4. Dayat Hidayat 5. Syawal Rahman 6. Alfin Nugraha

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA